

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan Allah SWT. Dengan kesempurnaan, manusia mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Manusia menjadi sumber daya paling potensial pada suatu negara, seperti diungkap Fadjar (2001), "Terobosan yang paling menggairahkan dari abad 21 bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang apa arti manusia". Sumber daya manusia-lah yang berperan dalam pembangunan suatu negara, sesuai dengan konsep Naisbitt (1995), "Tepi Asia Pasifik telah memperlihatkan, negara miskinpun bangkit, tanpa sumber daya alam melimpah, asalkan negara melakukan investasinya yang cukup dalam hal sumber daya manusia".

Manusia mampu membuat loncatan-loncatan dalam perjalanan sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan salah satu bukti sejarah yang dihasilkan oleh manusia. Manusia telah berhasil berkunjung ke planet lain, dan masih banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh manusia dalam perjalanan sejarah, namun apakah manusia sudah merasa puas? Ternyata manusia tidak pernah merasa puas, seperti yang diungkap oleh Einstein (dalam Suparman, 2003: 3), sebagai berikut:

Mengapa ilmu yang sangat indah ini, yang menghemat kerja dan membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang lebih sedikit pada kepada kita? Jawaban yang lebih sederhana adalah karena kita belum lagi siap belajar bagaimana menggunakan secara wajar. Dalam peperangan, ilmu menyebabkan kita saling meracun dan menjegal. Dalam masa damai, ia

membikin hidup kita dikejar-kejar waktu dan penuh tidak tentu. Ilmu yang seharusnya, membebaskan kita dari pekerjaan yang melelahkan spiritual malah menjadikan manusia budak-budak mesin....(dikutip dari Yuyun, S, 1985: 248).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan tidak mengaburkan peranannya sebagai makhluk individu, manusia diharapkan mampu menempatkan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan bijak, sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang harmonis.

Sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia ditentukan oleh seberapa jauh ia dapat menempatkan diri dalam ikatan harmonis antara sesama manusia, baik dalam skala makro maupun mikro. Manusia pada hakekatnya tidak ada yang sanggup hidup sendiri, maka cita-cita moral tertinggi untuk senantiasa hidup berdampingan harus dilestarikan.

Kehidupan manusia dalam fungsinya sebagai makhluk sosial, saat ini mengalami kemunduran, hubungan manusia dengan manusia yang lain agak renggang dan peran sebagai makhluk sosial terabaikan. Keharmonisan mulai terkikis oleh hal baru yang bersumber dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun hal ini bukan satu-satunya faktor, namun sifat individualisme dan materialisme semakin tampak dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan berbangsa, dan bernegara sebagai aplikasi kehidupan sosial yang memiliki nilai tinggi, telah mengalami degradasi. Rasa dan semangat kebangsaan Indonesia merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur sebagai warisan budaya yang bersumber dari nenek moyang. Warisan budaya, mempunyai nilai tinggi, tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat sejak lama, dan menjadi pedoman dalam hidup seseorang, menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Fenomena globalisasi telah mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Hal ini membawa dampak positif dan negatif terhadap berbagai bidang kehidupan. Dampak positifnya adalah bertambahnya kecepatan dan peningkatan tingkat berfikir di dalam berbagai bidang, dan terjadi perubahan pola hidup yang lebih efisien dan pragmatis. Dampak negatifnya adalah masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami dan merencanakan perkembangan yang begitu cepat di berbagai bidang, sehingga terjadi benturan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Tilar (dalam Abdulhak, 1998: 1), meminjam pendapat Rosseau dalam bukunya *Turbulance in World Politics*, mengidentifikasi lima sumber proses globalisasi, yang terdiri dari:

- 1) Globalisasi yang diakibatkan oleh dinamika teknologi yang mengurangi jarak global serta gerakan manusia yang cepat;
- 2) Globalisasi yang muncul dari masalah-masalah di bumi ini, misalnya masalah lingkungan dan masalah kependudukan;
- 3) Proses globalisasi sebagai akibat munculnya kemampuan negara memecahkan masalahnya secara sosial;
- 4) Munculnya sub-sub kelompok semakin kuat dalam masyarakat bangsa; dan
- 5) Globalisasi sebagai akibat meningkatnya keahlian, pendidikan, dan masalah-masalah di luar batas negaranya.

Pernyataan di atas merupakan contoh akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi, yang berdampak besar pada perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan manusia. Mengingat struktur masyarakat Indonesia mempunyai ciri

yang unik, yang terdiri dari kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan berbagai perbedaan, seperti yang dikatakan Nasikun (1984: 28), sebagai berikut:

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah, yang cukup tajam.

Dengan perbedaan ini, seringkali disebut sebagai masyarakat majemuk.

Dengan perubahan yang terjadi, warga negara Indonesia harus mempersiapkan diri sedini mungkin, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta berharap tidak terjadi benturan terhadap nilai-nilai yang ada. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan disharmoni yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

Syaripudin dalam forum Pengkajian Seskoad (1994: 103), menjelaskan pengaruh negatif globalisasi terhadap nasionalisme atau rasa kebangsaan, sebagai berikut:

Selain itu banyak kalangan memprihatinkan bahwasanya terpaan arus globalisasi di hampir segala bidang kehidupan masyarakat telah berkembang lebih jauh, makin kompleks dan makin rumit, hingga dalam banyak hal, jiwa nasionalisme bangsa tidak lagi menjadi hirauan utama dalam cara pandang dan pola pikir.

Sejak beberapa tahun terakhir, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ditandai oleh guncangan berat yang amat mencengangkan, menurut Swasono (2005: 1) "...terasa adanya potensi disintegrasi sosial yang muncul di berbagai penjuru tanah air, bahkan sebagian telah terwujud nyata di sejumlah wilayah tertentu". Dalam pernyataan ini tersirat, betapa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia begitu kompleks, dan dikhawatirkan berdampak pada keutuhan bangsa.

Krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia begitu besar, namun ironisnya anak bangsa yang memiliki akses pada kekuasaan sebagai politisi, seperti tidak memiliki rasa kepedulian (*sense of crisis*) terhadap permasalahan yang ada, akan tetapi dendam atas kesempatan yang belum diraih sebelumnya, sehingga mengulang kisah lama, dan jika itu yang terjadi, maka bangsa ini akan semakin terperosok ke dalam lubang yang semakin dalam.

Kompas, (23 Januari 2006: 4), "Perilaku para praktisi peradilan, yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat, namun pada kenyataannya, jauh menyimpang dari aturan dan etika hukum, sehingga membentuk praktik mafia peradilan yang mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan nasional bahkan internasional". Sedangkan Pikiran Rakyat (8 April 2005: 20), menyoroti perilaku KKN, sebagai berikut: "Di mana perilaku sosial-KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme), masih tumbuh subur pada beberapa instansi, serta perilaku budaya fanatik sukuisme di dalam otonomi daerah". Dalam Pikiran Rakyat (29 April 2006), dikemukakan bahwa: "Penyimpangan dana proyek melibatkan anggota DPRD Cilacap".

Realitas empirik di atas, merupakan suatu bukti yang memprihatinkan, nilai-nilai luhur bangsa sebagai warisan nenek moyang, sudah ditinggalkan generasi berikutnya dari bangsa ini. Kalaupun masih ada, hanya sebatas aksesoris belaka.

Peran pendidikan sangat diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tetap menjadi landasan bagi masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu cara agar nilai-nilai luhur tersebut tetap terjaga dan lestari, adalah melalui program pendidikan. Pendidikan menurut Sanusi (1998: 267) adalah:

Proses mendidik atau membelajarkan peserta didik yang diasumsikan mempunyai beberapa fungsi seperti antara lain mampu menumbuhkan atau mentransformasikan nilai-nilai positif sambil memberdayakan serta mengembangkan potensi-potensi kepribadian peserta didik.

Melalui proses pendidikan, manusia diharapkan akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa secara spirituil, memiliki kepribadian yang luhur, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Semua ini merupakan harapan dan tujuan bagi semua manusia, terutama orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003, pasal 3, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Upaya pendidikan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki rasa dan semangat kebangsaan, merupakan proses pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai kebangsaan yang menjadi pemahaman, sikap, dan penghayatan warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negaranya. Seperti yang diungkap

Djahiri (1992: 23), "Pendidikan nilai esensial dibina secara kontinyu, terarah, terkendali dan berencana, karena sifat dunia afektif manusia itu sendiri yang labil-kontekstual/ kondisional-situasional". Pernyataan ini bermakna bahwa karakter bangsa dapat terbina secara baik, dan menjadi acuan serta pedoman sistem keyakinan diri pada manusia Indonesia, dalam kehidupan bangsa, asalkan dilakukan secara kontinyu, terarah, dan terencana.

Fenomena pendidikan saat ini belum sesuai harapan, masih banyak terjadi perilaku yang kontradiktif di lapangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa tujuan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Kehadiran masyarakat modern merupakan keniscayaan, namun tetap harus dibarengi oleh nilai-nilai yang terkandung di masyarakat. Seperti dikatakan Djahiri, (2004), "Kita tidak berharap kehadiran manusia/ masyarakat & kehidupan yang modern namun kufur dan dolim terhadap diri sendiri, Nilai-Moral-Norma luhur serta warisan budaya (*culture heritage*) Indonesia".

Nilai luhur Pancasila, belum sepenuhnya mampu dimiliki oleh bangsa ini. Padahal, kalau kita menggali jiwa bangsa Indonesia dari dahulu sampai sekarang, kita akan menemukan kelima unsur Pancasila dalam jiwa bangsa. Kelima unsur tersebut merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia. Seperti yang diungkap Abdullah (1983: 6), sebagai berikut:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti akan memberi kesempatan kepada agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk hidup berdampingan secara damai di dalam wadah Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi, Sila Persatuan Indonesia, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin persamaan hak antara sesama manusia dan semua golongan, tidak ada diskriminasi antara golongan yang satu dengan yang

lainnya. Membina persatuan Indonesia...Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditujukan untuk mencapai mufakat, karena musyawarah mengandung azas persaudaraan dan kekeluargaan. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tuntutan hati nurani semua manusia. Setiap orang menghendaki adanya kemakmuran yang merata tanpa adanya perbedaan yang menyolok dengan kata lain kemakmuran untuk seluruh bangsa.

Azra dalam Kompas (29 April 2006) mengemukakan, "Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia perlu revitalisasi dan aktualisasi" lebih lanjut beliau mengatakan bahwa "tidak ada tawaran ide dasar lain selain Pancasila yang tepat dan cocok untuk Indonesia, di mana Pancasila mempunyai kekuatan integratif". Diharapkan fenomena radikalisme dalam masyarakat Indonesia dapat dihilangkan dalam kelompok masyarakat Indonesia. Dari pernyataannya, tersirat bahwa hanya Pancasila-lah yang tepat untuk karakter bangsa Indonesia.

Fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini mengalami erosi. Kerusuhan di berbagai daerah merupakan indikasi. Ambon, Kalimantan, Sulawesi, merupakan daerah konflik yang sampai saat ini masih dalam taraf pemulihan. Perseteruan antar kampung, dan ledakan bom di berbagai tempat, merupakan contoh konkrit kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya: rasa ketidak-adilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang: ekonomi, kemiskinan, politik, SARA, dll. Seperti yang diberitakan Kompas. (30 April 2006), "Diberlakukannya jam malam dan perintah tembak di tempat di kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyusul kerusuhan massal sebagai buntut pemilihan kepala desa". Demikian pula yang terjadi di daerah Timika Papua, terkait dengan kasus Freeport yang dirasakan



masyarakat Papua sebagai bentuk ketidak-adilan, seperti diberitakan Kompas (30 April 2006), "Amuk massa kembali terjadi di Tembagapura, dua gedung PT Freeport Indonesia dirusak massa, empat mobil dibakar". Pada saat-saat lain, kita pun menyaksikan berbagai peristiwa huru-hara sosial, yang mampu meluluh lantakkan kehidupan berbangsa, seperti yang dungkap Azra, (2000: 5), sebagai berikut:

Dari Timor Timur, Timika (Irian Jaya), peristiwa Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Pasar Tanahabang (Jakarta), Situbondo (Jawa Timur), Sanggauledo, Sambas, dan Pontianak (Kalimantan Barat): Tasikmalaya, dan Rengasdengklok (Jawa Barat) dan Kerusuhan di Bandung Hampir semua kerusuhan itu berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik dengan nuansa suku, agama, ras, dan antar golongan yang cukup kental.

Terlepas dari penyebab atau motif yang melatarbelakanginya, kerusuhan tersebut merupakan langkah mundur (*setback*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat, dalam kerusuhan-kerusuhan itu, menjadi ciri bahwa nilai-nilai luhur bangsa sudah mulai ditinggalkan. Semangat kebangsaan nyaris hilang, seperti yang dungkap oleh Yudohusodo (1996: 6), bahwa:

...Semangat kebangsaan yang ada terasa telah mendangkal. telah terjadi erosi rasa kebangsaan dari bangsa yang majemuk ini akan merosot dan tenggelam oleh adanya gejala menonjolnya semangat kesukuan dan keagamaan, yang semula merupakan unsur-unsur yang membentuk negara-negara ini. Adapula yang merasa prihatin karena menganggap adanya upaya-upaya yang sistematis untuk memasukkan pandangan-pandangan budaya asing ke dalam budaya hidup bangsa kita, atau ke dalam pandangan hidup kita, yang pada saatnya akan dapat melunturkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang telah terbina selama ini.

Kondisi ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa takut, saling curiga, sikap pesimis dan apatis pada diri masyarakat, hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah, menjadikan pembangunan tidak berjalan dengan wajar. Pembangunan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat terhenti, tidak ada perubahan yang berarti, karena harus kembali ke titik nol. Maka tujuan nasional serta terwujudnya cita-cita bangsa mustahil dapat segera tercapai.

Adanya indikasi defisit nasionalisme merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Seperti yang dipaparkan Purnomo dalam Kompas (16 Mei 2006), "...sesuatu yang sangat membahayakan, hal ini tergambar bukan hanya dalam kalangan elite politik dan pemerintahan, tapi juga dalam partai politik yang sesungguhnya mengusung nasionalisme itu sendiri". Sama halnya dengan buntut demo buruh yang terjadi pada tanggal 3 Mei 2006, peristiwa ini mengisyaratkan, betapa kurang dan lemahnya semangat nasionalisme dibangun di Nusantara. Atas fakta anarkis, banyak pihak saling tuding. Akar saling tuding adalah prasangka, dan prasangka tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperburuk keadaan.

Mendahulukan kepentingan bangsa, itulah hakikat semangat nasionalisme, dan hal itu telah hilang dari kehidupan berbangsa. Akibatnya kita berada dalam defisit semangat nasionalisme. Namun sekarang ini, seperti ada yang salah dalam perjalanan nasionalisme negara kita. Seperti yang dijelaskan Karman dalam Kompas (2006, 20 Mei), sebagai berikut:

Rasa senasib seperti semasa pergerakan dan kemerdekaan kian menipis. Persatuan nasional yang dibangun dengan susah payah, dalam perkembangannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Tanpa

revitalisasi nasionalisme sulit dibayangkan seperti apa masa depan Indonesia, ibarat tubuh tanpa roh.

Berkaca kepada sejarah panjang, hingga apa yang dicapai bangsa dan negara ini, secara *de facto*, kita sedang mengulang kekalahan demi kekalahan. Sungguhpun kekalahan harus diterima sebagai tonggak penting bangkitnya kesadaran. Kekalahan akan terus menjadi kekalahan, jika tidak kita pedulikan. Padahal fase ini kita sadari bersama sebagai fase transisi, sebuah fase di mana segala perubahan penting dan mendasar dimungkinkan dilakukan bersama, dengan legitimasi politik yang telah diberikan rakyat atas nama tuntutan jaman.

Konsep pendidikan dalam era globalisasi tidak boleh terlepas dari pendidikan nilai (afektif) yang proporsional dengan aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor). Seperti dikatakan Suyatno (2001: 21), bahwa: "Pendidikan bukan sekedar terfokus pada alih-pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun tak kalah pentingnya disertai signifikansi alih-sikap (*transfer of attitude*)". Para ahli pendidikan Indonesia, sejak akhir dasawarsa 1970-an, mulai sungguh-sungguh mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian pada aspek nilai dan sikap.

Pendidikan Kewarganegaraan, selanjutnya disebut PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai kontribusi besar untuk alih-sikap (*transfer of attitude*). PKn merupakan salah satu bentuk pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadikan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003: 2).

PKn sebagai salah satu mata pelajaran dapat menjadi filter terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di era global, seperti yang dijelaskan Wahab (1996: 2), sebagai berikut:

...munculnya perubahan status dan batas-batas negara menyebabkan hubungan yang rumit dengan nasionalisme, identitas politik, partisipasi warga negara. Adanya pengungsi global yang telah menimbulkan orang-orang tanpa kewarganegaraan dalam sistem politik kontemporer mengisyaratkan pentingnya persiapan warga negara Indonesia menghadapi perubahan-perubahan tersebut melalui PKn.

Melalui mata pelajaran PKn, nilai Pancasila diharapkan dapat diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari, menyangkut kegiatan dasar manusia (*basic human activities*) yang meliputi keseluruhan hidup manusia, yang dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, dan nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 2, bahwa:

Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat a) Pendidikan Pancasila, b) Pendidikan Agama, c) PKn. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konsep manusia Indonesia seutuhnya akan terwujud secara bertahap.

PKn merupakan bagian atau salah satu tujuan Pendidikan IPS, di mana bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu (*integrated*) dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, UUD 1945, dan perundangan negara, dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga negara dengan negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara, seperti yang dikatakan Somantri (2001: 159), sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.

PKn merupakan seleksi dan adaptasi dari lintas keilmuan yang disajikan secara psikologis dan ilmiah guna mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS. Terkait erat dengan penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana: "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Salah satu materi PKn dalam rangka menjadikan warga negara yang baik adalah muatan nilai Pancasila.

Komponen lain yang perlu diamati terhadap posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentuk karakter bangsa, adalah materi pelajaran, pendekatan yang mesti diorganisasi secara sistematis dari dimensi teoritis, praktis, pengalaman siswa (*the hidden aspect*). Di samping itu, tingkat usia siswa, lingkungan hidup, hingga guru-pun, perlu mempersiapkan dan memperhatikan pemahaman tentang tujuan pembelajaran per kelas. Rumusan tujuan pembelajaran, dalam standar kompetensi yang tercantum dalam kurikulum 2004, selain mengandung nilai luhur Pancasila, juga berisi kemampuan yang harus dibina dan dikembangkan oleh siswa pada kelas tersebut. Penentuan pokok bahasan yang akan disampaikan pada saat pertemuan, merupakan penuntun ke arah pengembangan pelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dilihat dari segi kebutuhan, siswa SMA, selaku generasi muda membutuhkan pendidikan nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pembentuk karakter bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan

perundangan yang ada. Hal ini terkait erat dengan kedudukan strategis generasi muda. Sejalan dengan itu, Kansil (1986: 99) menyatakan:

Dilihat dari segi kebutuhan, maka generasi muda adalah sumber daya manusia di masa yang akan datang. Sebagai sumber insan dari potensi bangsa, maka generasi muda perlu dipersiapkan agar berpartisipasi aktif dan memberi sumbangan positif kepada pembangunan bangsa dan negara...Disadari bahwa masa depan adalah milik generasi muda. Ia adalah lanjutan masa kini dan merupakan hasil masa lampau.

Rasa kebangsaan atau nasionalisme harus ditumbuhkan, dalam diri siswa selaku generasi muda, terkait dengan peranannya di masa yang akan datang, sehingga mampu memberi kontribusi bagi bangsa dan negara, dengan potensi yang dimiliki, sehingga mampu membawa nama besar bangsa di dalam percaturan Internasional. Sementara itu, Mulkan (dalam Nasikun 1996:17-19) menyatakan bahwa:

Nasionalisme di mata generasi muda pasca perang kemerdekaan, mempunyai makna relatif berbeda dari generasi yang bergumul dan terlibat perang kemerdekaan...pengalaman hidup antar generasi dalam pergumulan kenegaraan dan kebangsaan yang berbeda dapat menumbuhkan sentimen kebangsaan dan kenegaraan yang berbeda.

Berkaitan dengan upaya pembentukkan karakter bangsa, diperlukan pemahaman konsep pendidikan nilai. Pendidikan nilai yang dimaksud adalah bersumber dari posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentukkan karakter bangsa.

## **B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn dapat membentuk karakter bangsa pada diri siswa?

### **2. Fokus Masalah**

Agar masalah penelitian terfokus, berikut dirumuskan fokus-fokus masalah penelitian dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn?
2. Sampai sejauh mana kontribusi nilai Pancasila dalam memperkaya materi dalam pembentukan karakter bangsa?
3. Bagaimana strategi memasukkan nilai Pancasila dalam materi PKn?
4. Metode apa yang paling tepat untuk memasukkan nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn?
5. Bentuk evaluasi apa yang paling tepat dalam menilai nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn?
6. Bagaimana nilai Pancasila pada mata Pelajaran PKn dapat diimplementasikan pada siswa?

### C. Verifikasi Konsep

Penulis berpandangan dan menafsirkan bahwa Posisi nilai Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Posisi Nilai Pancasila dalam tesis ini, dimaknai sebagai letak dari pesan, semangat, yang dijiwai oleh kelima sila/ azas dalam Pancasila. Melalui Nilai Pancasila, sebagai warisan budaya (*culture heritage*), maka karakter bangsa Indonesia sungguh berbeda dengan bangsa lain. Posisi nilai Pancasila menempatkannya dalam letak, tempat strategis, yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali.
2. Mata pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai (*values*). Ide pokok mata pelajaran PKn adalah ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan dan keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat demokratis konstitusional.
3. Karakter bangsa mengandung makna: sifat kejiwaan, atau tabiat yang dimiliki oleh kesatuan orang-orang yang besamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. serta pemerintahan sendiri, yakni berupa nilai-nilai luhur yang merupakan warisan nenek moyang yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil tentang gambaran posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter bangsa di SMA di Purwakarta.

#### **b. Tujuan Khusus :**

- 1) Menemukan posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran.
- 2) Menemukan sejauh mana kontribusi nilai Pancasila dalam memperkaya materi dalam pembentukan karakter bangsa.
- 3) Menemukan strategi dalam memasukkan nilai Pancasila dalam materi PKn.
- 4) Menemukan metode yang paling tepat untuk memasukkan nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn.
- 5) Menemukan evaluasi yang paling tepat dalam menilai nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn.
- 6) Menemukan sejauh mana nilai Pancasila pada mata Pelajaran PKn dapat diimplementasikan pada siswa.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

### a. Teoritis

- 1) Secara konseptual, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap pembentukan karakter bangsa melalui nilai Pancasila dalam mata pelajaran PKn;
- 2) Mengadakan inovasi pembelajaran dalam mengupayakan pembentukan karakter bangsa melalui nilai Pancasila dalam mata pelajaran PKn.

### b. Praktis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran ke arah pembentukan karakter bangsa melalui nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn. Bagi guru, dituntut memiliki kreatifitas dan daya nalar tinggi, serta wawasan dan kemampuan tentang keterampilan proses belajar mengajar, sesuai dengan fungsi dan peran serta tanggung jawab yang bersangkutan secara profesional agar pembentukan karakter bangsa melalui nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn tercapai;
- 2) Sebagai informasi dan rujukan bagi guru PKn untuk meningkatkan kualifikasi belajar siswa, tidak hanya terbatas pada aspek kemampuan (pengetahuan dan pemahaman), disertai kognitif tingkat tinggi (penerapan analisis, dan evaluasi), disertai aspek afektif dan psikomotor secara utuh dan bulat (aspek fisik-non fisik, emosi-intelektual, kognitif-afektif-psikomotor), khususnya berkenaan dengan pembentukan karakter bangsa,

sesuai dengan agama dan budaya bangsa Indonesia. (budaya lokal-lokal genius);

- 3) Memberikan masukan informasi atau masukan bagi para peneliti, serta pengambil kebijakan baik dalam dunia persekolahan maupun praktisi yang berhubungan dengan pembentukan karakter bangsa melalui nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Gagasan Dasar Pemikiran**

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, merupakan landasan sistem untuk pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi sangat penting, karena memiliki nilai-nilai kebenaran yang perlu dianut. Pancasila akan tetap bertahan hidup jika masyarakat Indonesia masih mengakui kebenarannya dan masih memahami dan mengamalkan secara murni dan konsekuen.

Pancasila mempunyai sifat yang terbuka, yang berarti tidak kaku atau dapat mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi negara Indonesia, sehingga dalam keadaan atau kondisi apapun Pancasila selalu menjadi landasan atau pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Tujuan pendidikan secara makro, yakni membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom, yang mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk

menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memiliki sumber daya yang potensial serta tangguh.

Adapun tujuan pendidikan secara mikro adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab, dan berwawasan budaya bangsa Indonesia, memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif, dan demokratis), dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia yang mandiri.

Sekolah merupakan institusi resmi pendidikan. Di sekolah siswa dapat berinteraksi dengan masyarakat sekolah lainnya, baik dengan sesama siswa, guru, karyawan Tata Usaha, ataupun Kepala Sekolah. Di sekolah siswa mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan, dari guru untuk mempelajari hal-hal yang baru. Melalui mata pelajaran PKn, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik "*good citizenship*". Maka sekolah merupakan tempat yang cocok dalam melakukan upaya pembentukan karakter bangsa terhadap siswa.

Sejalan dengan tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni mempersiapkan peserta didik sedini mungkin terhadap transformasi yang berorientasi pada pembekalan pengetahuan serta memiliki sikap dan keterampilan sosial dalam kehidupan di masyarakat, peserta didik dipersiapkan untuk memiliki kemantapan dasar konseptual atas dasar kajian historis empirik serta realitas dalam

perspektif terhadap perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam menghadapi era globalisasi dan informasi modern.

Fenomena saat ini, seperti terasa adanya kekhawatiran ancaman perpecahan nasional akibat kasus-kasus SARA, yang tak henti-hentinya terjadi. Sejarawan Australia, M.C. Ricklefs (dalam Sumardjo, 2004: 2) menulis: "Dalam sebuah negeri yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter, maka banyak yang bergantung pada kearifan dan nasib baik bagi kepemimpinan Indonesia". Maka tersirat, bahwa dengan kondisi Indonesia yang masih jauh dari sejahtera, peranan pemimpin sungguh amat diperlukan.

Konflik sosial-politik dalam masyarakat pada umumnya bersifat kompleks.

Seperti yang diungkap Sahidin (2004:1), bahwa:

Konflik itu disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkait dan bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik-sosial-politik hendaknya menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional dengan menyertakan berbagai komponen dalam masyarakat dan berbagai entitas politik yang ada.

Dalam situasi seperti ini, mengharuskan kita melakukan langkah-langkah konkrit demi mempertahankan keutuhan berbangsa dan bernegara, namun menghindarkan kita menjadi negara kapitalis, seperti yang diungkap Lubis (1984: 46), bahwa: "tidakkah sudah waktunya kita memikirkan langkah-langkah apa yang paling tepat untuk menghindarkan negara kita berkembang jadi negara kapitalis seperti Amerika dan Jepang?...". Selanjutnya Lubis (1984: 46-47), mengemukakan bahwa:

Kita tengah menghadapi krisis nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan akibat pelbagai pengalaman bangsa kita dalam sejarah yang lampau. Identitas kita pecah berkeping-keping, nilai budaya kita telah rusak, termasuk di dalamnya nilai-nilai moral kita.

Sebagai dasar negara yang juga merupakan ideologi nasional, Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Sedemikian mendasarnya nilai Pancasila dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian, identitas) sehingga pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup sangat wajar. Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan hidup yang mendasar dan hakikat rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan ketuhanan, kemanusiaan, kenegaraan, kekeluargaan, dan musyawarah serta keadilan sosial.

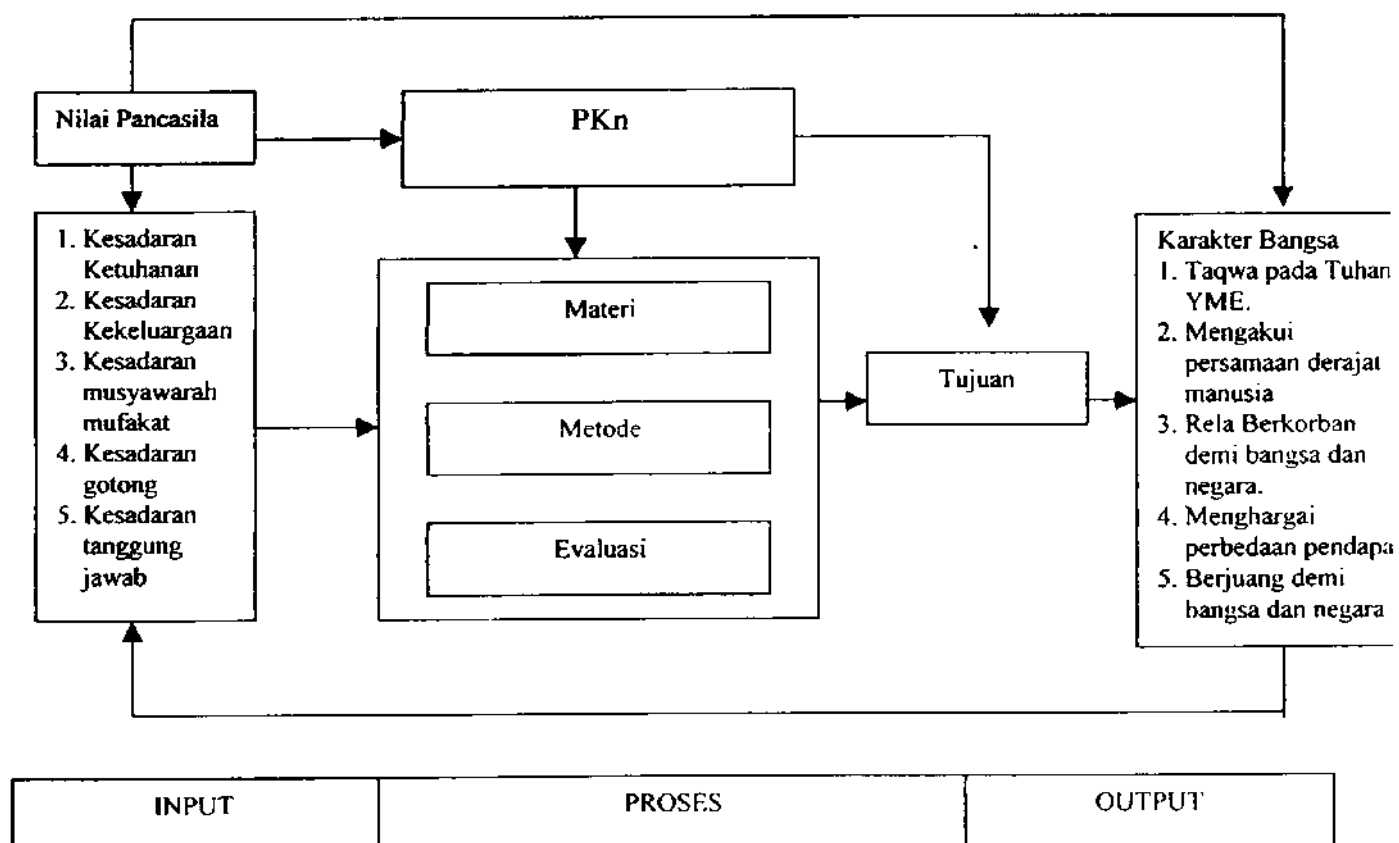
Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa. Menurut Alfian (dalam Budiyanto, 2005: 136), yang dimaksud dengan ideologi adalah: "Suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan".

## **2. Asumsi**

1. Posisi nilai Pancasila dapat ditemukan pada mata pelajaran PKn.
2. Kontribusi nilai Pancasila dalam memperkaya materi dalam pembentukan karakter bangsa sangat besar.
3. Adanya strategi dalam memasukkan nilai Pancasila dalam materi PKn.

4. Adanya metode yang tepat dalam mengimplementasikan nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn.
5. Terdapat bentuk evaluasi yang paling tepat dalam menilai nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn.
6. Menemukan sejauh mana nilai Pancasila pada mata Pelajaran PKn dapat diimplementasikan pada siswa.

### 3. Skematik/ Paradigma Penelitian



## F. Posisi Studi

PKn mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan kepada peserta didik yang dapat menumbuhkan kemampuannya sebagai warga negara yang baik

PKn merupakan bagian dari Pendidikan Sosial, hal ini dapat dilihat dari pengertian Pendidikan Sosial (*Social Studies*) diberikan oleh Barr *et al.* (Kusuma, 2005: 56-60) adalah sebagai berikut:

*Social studies is an integration of social sciences and humanities for the purpose of instruction in citizenship education. We emphasize 'integratio' for social studies is the only field which deliberately attempts to draw upon, in an integrated fashion, the data of the social sciences and the insights of humanities. We emphasize 'citizenship' for social studies, despite the difference in orientation, outlook, purpose, and methode of teaching is almost universally perceived as preparation for citizenship in a democracy.*

Pendidikan Sosial (*Social Studies*) disikapi sebagai perpaduan ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembelajaran dalam rangka pendidikan warga negara (*Citizenship Education*). Perpaduan adalah upaya yang disengaja untuk menggunakan data dari ilmu-ilmu sosial dan wawasan dari humaniora sebagai upaya untuk mempersiapkan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Melalui Pendidikan Sosial (*Social Studies*), kehidupan sosial manusia dapat dikaji secara utuh dan menyeluruh. Diharapkan nantinya peserta didik dapat memahami berbagai aspek kehidupan ini, sehingga dapat mengatasi masalahnya dan dapat membantu mengatasi masalah orang lain, atau mampu membangun dirinya dan membangun masyarakat, menjadi warga negara yang baik.



Secara epistemologi, sesungguhnya Pendidikan Sosial (*Social Studies*) juga memiliki kaitan erat dengan Ilmu Sosial (*Social Science*). *Social Studies* menurut Dufty (1970 : 7) :

1. *They are bodies of organized scientific knowledge about human relationships.*
2. *Scientific knowledge is reliable and can be verified: it is a public knowledge and anyone can use the same instruments and check up on the knowledge claims of other people.*
3. *This knowledge is derived by process of questioning, hypothesizing, data gathering (by observation and experiment), and data analysis. It seeks measures of significant variables.*
4. *The data substantiated Social Scientists is used to develop generalizations and an attempt is made to state 'laws' or develop powerful theories. These generalizations may assists in explaining the present or they may used for predictive inference about the future for prognosticating about what may occur, as among certain circumstances prevail.*

Dari Penjelasan Dufty tersebut dapat dimaknai bahwa ilmu-ilmu sosial adalah suatu tubuh pengetahuan ilmiah yang terorganisir mengenai hubungan manusia. Pengetahuan ini bersifat objektif yang diperoleh melalui proses penelitian ilmiah baku, yang telah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sesuai dengan bidang kajiannya.

Istilah Pendidikan IPS merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*Social Studies*". Pendidikan IPS menurut Al-Muchtar (2000: 14) secara programik keilmuan ditopang oleh dua kekuatan disiplin ilmu, yaitu a) Ilmu pendidikan, dan b) ilmu-ilmu sosial. Sebagai disiplin ilmu pendidikan IPS mengandung dua pengertian:

- 1). Pendidikan sebagai disiplin ilmu, mempelajari apa yang terjadi dalam upaya manusia melakukan pendidikan, bertujuan untuk menemukan kebenaran yang dirumuskan dalam bentuk prinsip, generalisasi, teori, ataupun hukum.
- 2). Pendidikan sebagai suatu upaya yang dilakukan negara, masyarakat, keluarga, atau individu tertentu.

Keterlibatan *Social Studies* dengan *Citizenship Education* ditegaskan Mehlinger (dalam Kusuma 2005: 6) bahwa "*Social Studies has no monopoly over Citizenship Education, but a Social Studies without Citizenship Education as its core is like yards of thread without a spool—all tangle and confusion*".

Makna dalam pernyataan ini adalah PKn dan Ilmu Sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Ilmu Sosial tanpa PKn sebagai pusatnya, laksana benang tanpa gulungan, semua akan kacau dan semrawut.

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran di tingkat persekolahan, mempunyai dua modus, yakni sebagai integrasi utuh konsep esensial disiplin ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan (*integrated social studies*), dan sebagai materi ajar disipliner yang disederhanakan dari masing-masing disiplin ilmu sosial untuk tujuan pendidikan (*disciplinary social studies*). Untuk sekolah dasar, Pendidikan IPS pada hakekatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk tujuan pendidikan (*citizenship education*). Seperti diberikan oleh Barr *et al.* (Kusuma, 2005: 56-60) adalah sebagai berikut:

*Social studies is an integration of social sciences and humanities for the purpose of instruction in citizenship education. We emphasize 'integratio' for social studies is the only field which deliberately attempts to draw upon, in an integrated fashion, the data of the social sciences and the insights of*

*humanities. We emphasize 'citizenship' for social studies, despite the difference in orientation, outlook, purpose, and methode of teaching is almost universally perceived as preparation for citizenship in a democracy.*

Dalam konteks pengajaran IPS, dikembangkan wawasan yang cukup tentang batang tubuh pengetahuan (*body of knowledge*) setiap disiplin ilmu sosial yang meliputi: struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (*mode of inquiry*), metode yang digunakan dan konsep setiap disiplin ilmu sehingga para peserta didik mampu menjadi aktor sosial (*social actor*) yang cerdas (Bank, 1977).

*Social studies* pada tataran konseptual dan praktis, oleh Barr dkk (1977 ;1978) dikelompokkan dalam tiga tradisi pedagogis, yakni *Social Studies* diajarkan sebagai (1) *Citizenship transmission*, (2) *Social Science*, (3) *Reflectife inquiry*". Yang kemudian mendapat penambahan oleh Michaelis (1980) yaitu (4) *Social studies as a social critism*, (5) *Social studies as personal development of the individual*

Tradisi "*Citizenship transmission*" merupakan tradisi tertua dari *Social science* yang isinya menekankan pada esensi bahwa: *Adult teachers process a particular conception of citizenship that they wish all students to share*. yaitu siswa perlu mendapatkan pengetahuan sebagai *Seft evident truth* yakni kebenaran yang diyakini sendiri, dan tugas guru adalah menyampaikan pengetahuan yang diyakini kebenarannya dengan cara kelangsungan hidup masyarakat diyakini dapat dipertahankan,

Tradisi *Social Science* merupakan tradisi yang dimotori oleh sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial, yang bertujuan mengembangkan para siswa agar dapat

menguasai pengetahuan, keterampilan, metode, dari disiplin ilmu sosial sebagai sarana menjasi warga negara yang efektif. Pendukung tradisi ini percaya dapat melatih siswa untuk berfikir dan melihat dunia sebagaimana adanya. Tradisi ini tidak menekankan pada penguasaan fakta, tetapi pada metode kerja ahli ilmu sosial, sebagai upaya memperkuat peranannya sebagai warga negara.

Tradisi *Reflective inquiry*, pada dasarnya menekankan pada upaya melatih siswa agar dapat mengambil keputusan dalam konteks sosial politik, azas demokrasi selalu menuntut warga negara untuk turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Tradisi *Social studies as social criticism* adalah kemampuan membiasakan diri dalam bersikap peka, tanggap dan adaptif tetapi kritis terhadap lingkungan sekitar guna memanfaatkan sumber daya alam seta mengembangkan kehidupan yang sejahtera, harmonis dalam kebhinekaan.

Tradisi *Social studies as personal development of individual* yaitu: kemampuan menganalisis secara terpadu untuk sampai pada kesadaran bahwa adanya saling ketergantungan antara fenomena dan gagasan dalam setiap menghadapi berbagai masalah sosial maupun dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, dinamis, dan harmonis

Sedangkan oleh "*the Board of Directors of National Council for the Social Studies*", (dalam Somantrie, 2005: 1) *Social Studies* dirumuskan kembali definisinya pada tahun 1992 sebagai berikut:

*Social studies is the integrated study of the social science and humanities to promote civic competence. Wirthin the school program, social studies*

*provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good of citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.*

Atas dasar uraian di atas, tampak bahwa Pendidikan Sosial di arahkan untuk para siswa dapat memiliki spektrum pengalaman belajar dan pengalaman hidup yang luas untuk menjadi warga negara yang kompeten dari masyarakat demokratis dan berbeda secara kultural dalam suatu dunia yang saling tergantung.

Pendidikan Sosial (*Social Studies*) disikapi sebagai perpaduan ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembelajaran dalam rangka pendidikan warga negara (*Citizenship Education*). Perpaduan adalah upaya yang disengaja untuk menggunakan data dari ilmu-ilmu sosial dan wawasan dari humaniora sebagai upaya untuk mempersiapkan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Melalui IPS, kehidupan sosial manusia dapat dikaji secara utuh dan menyeluruh. Diharapkan nantinya peserta didik dapat memahami berbagai aspek kehidupan ini, sehingga dapat mengatasi masalahnya dan dapat membantu mengatasi masalah orang lain, atau mampu membangun dirinya dan membangun masyarakat, menjadi warga negara yang baik.

Selain dalam paradigma baru IPS yang menempatkan *Citizenship Transmission* atau PKn sebagai salah satu tradisinya, dengan esensi dari IPS secara keseluruhan, *Citizenship Transmission* secara mandiri sesungguhnya telah berkembang sebagai suatu bidang kajian dan program demokrasi yang solid.